

DAMPAK RESOLUSI 16/18 DEWAN HAM PBB DALAM KEBIJAKAN EQUALITY ACT 2010 TERHADAP PENCEGAHAN GERAKAN ISLAMOPHOBIA DAN ANTI-IMIGRAN DI INGGRIS MELALUI LEMBAGA TELL MAMA TAHUN 2023-2025

Faisal Maulana¹, Adi Rio Arianto^{2*}

¹ Alumni Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

² Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: faisalmaul51@gmail.com , arianto.adirio@gmail.com

*Korespondensi: arianto.adirio@gmail.com

(Submission 20-08-2026, Revisions 05-10-2026, Accepted 06-10-2026)

Abstract

This article examines the policy of United Nations Human Rights Council Resolution 16/18 as adapted into the Equality Act 2010 by the British government, the implementation of which is carried out, among other means, through the Tell MAMA institution, an independent organization trusted by the British government to assist in handling reports from victims of violence and hate crimes on the basis of religion, belief, ethnicity, and nationality. The adaptation of this resolution theoretically constitutes an effort toward social integration within the international regime for the protection of human rights. The research employs a qualitative approach with a library research method. The findings indicate that the programs and activities conducted by the Tell MAMA institution throughout 2023–2025 demonstrate that UN Human Rights Council Resolution 16/18, as adapted through the Equality Act 2010 in the United Kingdom, has had a significant impact on the prevention of Islamophobic and anti-immigrant movements. This impact is evidenced by: (1) the formation of a harmonious social structure within society; (2) increased tolerance among religious communities; and (3) strengthened protection of minority groups.

Keywords: UN HRC Resolution 16/18, Tell MAMA, UK, Islamophobia, Anti-Immigrant.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kebijakan *Resolusi 16/18* Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadaptasi dalam kebijakan *Equality Act 2010* oleh pemerintah Inggris, yang dalam pelaksanaannya, diantaranya dilakukan melalui lembaga *Tell MAMA*, organisasi independen yang dipercayai oleh pemerintah Inggris dalam membantu penanganan laporan korban kekerasan dan kejahatan atas dasar agama, kepercayaan, etnis dan kebangsaan. Adaptasi terhadap resolusi tersebut secara teoritik merupakan usaha untuk melakukan integrasi sosial dalam rezim internasional untuk melindungi hak asasi manusia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga *Tell MAMA* sepanjang tahun 2023-2025, telah membuktikan bahwa *Resolusi 16/18* Dewan HAM PBB yang diadaptasi melalui kebijakan *Equality Act 2010* di Inggris, memiliki dampak yang signifikan dalam pencegahan gerakan Islamophobia dan anti imigran. Dampak tersebut dibuktikan dengan: (1) terbentuknya struktur sosial masyarakat yang harmonis; (2) meningkatnya toleransi antar umat beragama; dan (3) menguatnya perlindungan kelompok minoritas.

Kata Kunci: Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB, Tell MAMA, Inggris, Islamophobia, Anti Imigran.

PENDAHULUAN

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan-Bangsa-Bangsa (*United Nations Human Rights Council/UNHCR*) secara resmi mengadopsi *Resolusi 16/18* yang ditujukan untuk melawan intoleransi, stereotip, diskriminasi hingga provokasi dengan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan agama atau kepercayaan mereka pada 24 Maret 2011. *Resolusi 16/18* merupakan pengembangan dari resolusi yang telah dikeluarkan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait penistaan agama. Melalui Sekretaris Jenderal OKI ke-15, Ekmeleddin İhsanoğlu, OKI mendesak agar Dewan HAM PBB menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk mengambil tindakan tegas dalam menciptakan lingkungan yang damai, toleransi, dan saling menghargai bagi seluruh masyarakat setiap negara. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mendorong upaya pemerintah dalam mengembangkan strategi dalam melawan dan mengatasi penyebab adanya tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan seseorang.

Resolusi 16/18 merupakan bentuk pencapaian luar biasa dan bukti bahwa Dewan HAM PBB mampu menemukan solusi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap permasalahan global kontemporer. Ekmeleddin İhsanoğlu serta para diplomat yang tergabung dalam penyusunan *Resolusi 16/18* tersebut mengatakan bahwa diadopsinya resolusi tersebut oleh Dewan HAM PBB, merupakan momen “kemenangan multilateralisme”. Kesanggupan para diplomat untuk mempersatukan perbedaan politik dalam memperjuangkan pembentukan *Resolusi 16/18* merupakan bentuk keberhasilan komunitas internasional dalam upaya mencegah dan memerangi segala tindakan dan gerakan yang mengarah pada perilaku intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan seseorang (Limon et al., 2014).

Melalui *Resolusi 16/18*, Dewan HAM PBB menyatakan bahwa: *Pertama*, menegaskan kembali komitmen bahwa setiap negara keanggotaan PBB di bawah piagam perjanjian yang telah disepakati secara universal, untuk mendorong dan mempromosikan kepatuhan bersama terkait HAM dan kebebasan berekspresi tanpa membedakan atas dasar agama dan kepercayaan seseorang. *Kedua*, menegaskan kembali bahwa setiap negara keanggotaan PBB untuk melarang segala bentuk intoleransi, diskriminasi dan ujaran kebencian atas dasar agama ataupun kepercayaan seseorang serta menjamin perlindungan hukum yang berlaku secara adil dan efektif. *Ketiga*, sangat prihatin dengan segala bentuk tindakan diskriminasi, intoleransi, dan ujaran kebencian atas dasar agama dan kepercayaan. *Keempat*, mengecam segala bentuk tindakan diskriminasi, intoleransi, dan ujaran kebencian atas dasar agama dan kepercayaan, dan *kelima*, mengecam segala bentuk kekerasan terhadap seseorang atas dasar agama dan kepercayaan mereka serta tindakan terhadap rumah, sekolah ataupun tempat ibadah mereka (UNHRC, 2011).

Meskipun *Resolusi 16/18* merupakan hal yang penting, terdapat beberapa perbedaan pandangan dari negara-negara anggota PBB terkait penerapan dari resolusi tersebut (Kari Telle, 2022). Di Inggris, masalah Islamophobia dan anti imigran mengalami kompleksitas dengan kehadiran kelompok ekstrimis sayap kanan dan kelompok ultranasionalisme Inggris yang membangun ideologi dan propaganda menyesatkan tentang kehadiran kelompok Muslim dan imigran. Sebagai negara dengan lebih dari 3,5 juta umat Muslim dari total keseluruhan populasi dan memiliki pandangan *Freedom of Religion or Belief* (FoRB), yaitu dengan melindungi hak-hak kebebasan beragama dan kepercayaan setiap individu, sudah seharusnya pemerintah Inggris mengecam segala tindakan yang berkaitan dalam upaya diskriminasi dan kekerasan atas dasar kepercayaan atau agama setiap individu sebagaimana tercantum pada *Resolusi 16/18*.

Islamophobia memunculkan semacam rasisme struktural yang mengarah pada tindakan-tindakan provokasi. Selain itu, kelompok ekstrimis sayap kanan berusaha memanfaatkan Islamophobia sebagai “makanan” terhadap upaya radikalisasi kelompok-kelompok minoritas Islam di Inggris. Oleh karena itu, pemerintah dan tokoh publik yang peduli berusaha untuk melakukan pencegahan dan penanganan, termasuk perlunya melakukan evaluasi terhadap kesalahan pendidikan sistemik tentang Islam yang terjadi di masyarakat Inggris. Selain itu, peran media dan lembaga penyiaran juga diharapkan memiliki komitmen dalam mempertahankan program-program keagamaan yang mengarah pada upaya memerangi intoleransi (Birmingham, 2022).

Meningkatnya jumlah kasus laporan Islamophobia dan anti imigran di Inggris menjadi perhatian utama lembaga *Tell MAMA*. Lembaga ini merupakan salah satu organisasi non-pemerintah yang memiliki basis di Inggris. *Tell MAMA* merupakan lembaga yang diakui secara resmi oleh pemerintah

Inggris dalam membantu pengumpulan informasi laporan korban serta memberikan penanganan dan solusi bagi para korban yang terdampak akibat dari aksi Islamophobia dan anti imigran di Inggris. Dalam membantu pengumpulan data dan informasi terhadap aksi Islamophobia dan anti-imigran di beberapa kota besar Inggris, *Tell MAMA* telah menjalin kemitraan strategis dengan kepolisian nasional Inggris sejak tahun 2012.

Pemerintah Inggris telah melakukan berbagai komitmen dalam mengatasi permasalahan Islamophobia yang semakin masif dengan mempromosikan *Freedom of Religion and Belief* (FoRB). Selain itu, pemerintah Inggris juga melakukan berbagai kerja sama internasional dalam mendorong kebebasan beragama dan berkeyakinan di Inggris. Pemerintah Inggris juga memberikan dukungan pada lembaga *Tell MAMA* dengan memberikan pendanaan lebih dari 2,8 juta poundsterling dalam upaya mengatasi dan mencegah segala bentuk Islamophobia serta memberikan lebih dari 1,5 juta poundsterling untuk membantu proyek anti kejahatan, kebencian dan kekerasan terhadap umat Muslim di sekolah-sekolah. Pendidikan merupakan pondasi utama yang dilakukan pemerintah Inggris dalam menentang segala tindakan intoleransi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kebebasan individu terhadap segala perbedaan.

Equality Act 2010 merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah Inggris untuk memperkuat perlindungan hukum di beberapa bidang sosial terkait diskriminasi, intoleransi dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan isu permasalahan sosial masyarakat. *Equality Act 2010* menetapkan kerangka hukum yang jelas terkait segala bentuk diskriminasi dan intoleransi, baik secara tindakan maupun secara lisan. Kebijakan ini secara resmi diberlakukan oleh pemerintah Inggris sejak 1 Oktober 2010 dan dinilai signifikan untuk memperkuat eksistensi kebijakan anti-diskriminasi. Kehadiran *Equality Act 2010* dimaksudkan untuk melengkapi dan mengganti undang-undang anti diskriminasi yang sebelumnya terbagi menjadi beberapa kebijakan berbeda sehingga menjadi satu kesatuan kebijakan yang lebih komprehensif dan efisien.

Dalam studi sosiologi, integrasi sosial merupakan proses adaptasi terhadap unsur-unsur yang saling berbeda di lingkungan masyarakat sehingga terciptanya satu kesatuan yang saling melengkapi. Menurut Kun Maryati dan Juju Suryawati, integrasi sosial melibatkan proses kesetaraan dalam perbedaan bahasa, agama, ras, kepercayaan, nilai dan norma serta kedudukan sosial. Kelompok masyarakat seharusnya berada dalam sistem sosial yang mengikat untuk mencapai sebuah keseimbangan sehingga isu konflik sosial dapat dicegah. Proses kebersamaan dan persatuan serta kesepakatan bersama terkait peraturan, norma sosial dan penyatuan tujuan dapat mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Integrasi sosial merupakan suatu bentuk pengendalian konflik dalam sistem sosial sehingga tercipta unsur-unsur sosial yang satu padu dalam menciptakan lingkungan sosial masyarakat yang harmonis.

Proses integrasi sosial berupaya menjembatani perbedaan berbagai faktor dalam kaitannya dengan agama, sosial hingga nilai-nilai historis dalam mencegah kesenjangan dan konflik sosial. Konflik merupakan bentuk fenomena sosial yang selalu tercipta dalam setiap struktur sosial masyarakat. Adanya bentuk kepercayaan, pengakuan terhadap perbedaan serta kontrak moral merupakan kunci keberhasilan dalam mengelola proses integrasi sosial yang sesuai. Terciptanya rasa saling percaya mendorong kelompok-kelompok masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik sosial. Sementara itu bentuk pengakuan juga membangun sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan dalam masyarakat yang multikultural.

Gerakan sosial dalam ilmu sosiologi dimaknai sebagai suatu aksi massa yang dibentuk secara sistematis dalam suatu organisasi yang menentang sistem, otoritas dan kebijakan pemerintahan yang tidak adil. Menurut Rajendra Singh, setiap elemen masyarakat memiliki kesempatan dan hak politik mereka dalam melakukan tuntutan kepada sistem pemerintahan sehingga terdapat keseimbangan dalam suatu tatanan sosial masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique*, Singh menekankan bahwa kemunculan gerakan sosial merupakan reaksi alami terhadap ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap sistem yang berlaku di tatanan sosial masyarakat dalam membangun identitas dan memperjuangkan nilai-nilai perubahan. Setidaknya terdapat empat perspektif untuk memahami terjadinya gerakan sosial di masyarakat. *Pertama*, perspektif perilaku kolektif yang menekankan pada rasa frustrasi dan perasaan dipinggirkan dalam suatu sistem karena adanya kesenjangan dan ketimpangan dalam aspek ekonomi, politik, ataupun sosial dan budaya sebagai penyebab kemunculan gerakan sosial. Kesenjangan antara harapan dan

kenyataan menjadi alat utama yang memunculkan rasa ketidakpuasan beberapa pihak sehingga terjadi aksi dari sekumpulan massa yang memiliki tujuan dan ideologi yang sama dalam mengubah nilai-nilai yang sebelumnya dianggap merugikan salah satu kelompok masyarakat.

Kedua, perspektif sumber daya yang melihat masalah dan ketegangan sosial sebagai sumber kemunculan gerakan sosial. Ketidakpuasan seringkali menimbulkan gerakan sosial di masyarakat yang tidak pada tempatnya. Karenanya, kehadiran organisasi-organisasi gerakan sosial dapat menghadirkan struktur mobilisasi yang terorganisir terhadap aksi kolektif apapun. *Ketiga*, perspektif proses politik. Keberhasilan suatu gerakan sosial ditentukan berdasarkan peluang dan tantangan dalam sistem politik dalam lingkungan yang lebih luas atau yang dikenal sebagai “struktur peluang politik”. Singkatnya perspektif ini melihat lingkungan eksternal sebagai aspek yang berpengaruh dalam gerakan sosial, dan *keempat*, perspektif kultural sebagai wujud ketidakpuasan terhadap institusi dan sistem pemerintahan yang buruk. Perspektif ini mengedepankan konstruksi dan politisasi identitas sebagai alat utama partisipasi dalam keterlibatannya pada gerakan sosial.

Tell MAMA adalah organisasi independen (NGO) yang dipercayai oleh pemerintah Inggris dalam membantu penanganan laporan korban kekerasan dan kejahatan atas dasar agama, kepercayaan, etnis dan kebangsaan. Organisasi ini berupaya memperkuat integrasi sosial masyarakat Inggris. Kehadiran *Tell MAMA* merupakan jembatan untuk masyarakat Inggris dalam memperkuat solidaritas dan toleransi antar masyarakat melalui ruang dialog publik. *Tell MAMA* bisa disebut sebagai salah satu pelopor gerakan sosial yang mewakili komunitas Muslim dan kelompok imigran di Inggris dalam memberikan solusi dan pendampingan bagi para korban kekerasan dan kejahatan. Lembaga *Tell MAMA* meyakini bahwa integrasi sosial dapat diwujudkan dengan menyelesaikan permasalahan sosial melalui dialog publik.

Bersama *British Transport Police* serta kalangan masyarakat sipil lainnya yang peduli, *Tell MAMA* melakukan kampanye sosial seperti *Safer Travel for All* dan kampanye *#WeStandTogether* pada tahun 2024 dan 2025. Kampanye ini dilakukan untuk menghadapi semakin gencarnya kelompok ekstrimis sayap kanan dan kelompok ultranasionalis di Inggris menggunakan isu Islamophobia dan anti imigran. Gerakan sosial yang digalang *Tell MAMA* dapat memobilisasi kalangan masyarakat Inggris untuk bersatu dalam mencegah dan melawan tindakan Islamophobia dan anti imigran pada kelompok minoritas Inggris. Lingkungan sosial masyarakat Inggris akhirnya dapat kembali terorganisir dan terbebas dari ideologi dan doktrin kelompok ekstrimis dan kelompok ultranasionalis.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu manusia yang secara universal diakui berdasarkan norma hukum yang berlaku. ‘Melekat’ dalam pengertian ini didefinisikan sebagai hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan pemberian sejak kelahirannya sebagai manusia bukan atas dasar pemberian organisasi maupun negara. Hak asasi manusia merupakan sebuah instrumen dasar yang melekat pada setiap manusia untuk menjalani kehidupan berdasarkan asas kebebasan tanpa takut akan adanya hambatan dan ancaman (Yasser & Desiandri, 2023).

Penerapan konsep HAM di suatu negara melibatkan beberapa pihak seperti organisasi internasional, negara, lembaga masyarakat, dan kelompok masyarakat. Faktor utama keberhasilan penerapan HAM bergantung pada aspek hukum yang berlaku di negara tersebut ataupun kebijakan hukum internasional yang telah diatur sebelumnya oleh organisasi internasional yang berwenang. Adapun lembaga masyarakat dapat berperan melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui pemantauan dan mengadvokasi individu dan kelompok yang menjadi korban pelanggaran HAM (Yusuf Dkk, 2019).

Islamophobia dan anti imigran di Inggris merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia bagi kelompok minoritas di Inggris. Dalam perspektif HAM, manusia, negara dan kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci penting bagi keberhasilan dari penerapan konsep HAM bagi masyarakat Inggris. *Tell MAMA* merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan isu sosial tersebut. Mereka bekerja mengumpulkan dan menganalisis laporan terhadap para korban yang dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum dalam penerapan konsep HAM di lingkungan sosial masyarakat Inggris.

Artikel ini menjelaskan pengaruh *Resolusi 16/18* terhadap usaha-usaha yang dilakukan untuk melawan intoleransi, stereotip, diskriminasi hingga provokasi dengan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan agama atau kepercayaan mereka di negara Inggris, terutama melalui lembaga *Tell MAMA* selama tahun 2023-2025.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam upaya memahami makna dan filosofi subyek penelitian. Pendekatan kualitatif melibatkan beberapa prosedur penting dalam menyempurnakan hasil penelitian yang telah diidentifikasi dengan mengumpulkan data berdasarkan penilaian yang bersifat subjektif dan spesifik (Kusumastuti, 2023). Pendekatan kualitatif dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu deskripsi, eksplanasi, eksplorasi dan sejarah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai fenomena permasalahan penelitian yang sedang dikaji, yaitu memahami dan mengidentifikasi permasalahan mengenai fenomena islamofobia dan perlakuan anti-imigran terhadap kelompok-kelompok pendatang di Inggris dengan menggunakan resolusi kebijakan 16/18 Dewan HAM PBB sebagai langkah dalam mencegah serta menyelesaikan permasalahan tersebut.

Metode dalam memperoleh data penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Melalui metode ini, penulis memperoleh dan mengumpulkan data serta informasi berdasarkan buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah, literatur-literatur yang relevan serta sumber-sumber yang tertulis maupun yang bersifat elektronik. Penulis kemudian mengelolah data yang diperoleh dan disajikan dari berbagai sumber untuk mencapai hasil penelitian yang kemudian dirangkum menjadi informasi yang terstruktur dan spesifik sehingga hasil penelitian tersebut dapat ditafsirkan menjadi kesimpulan (Moleong, 2017).

PEMBAHASAN

Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB

Dewan HAM PBB merupakan salah satu badan antar pemerintah di bawah naungan PBB yang bertanggung jawab atas persoalan hak asasi manusia. Dewan tersebut memiliki 47 keanggotaan yang diwakili oleh beberapa negara. Dewan ini juga terlibat dalam forum-forum internasional yang tersedia dalam upaya untuk menangani persoalan terkait pelanggaran hak asasi manusia pada negara-negara tertentu atau negara yang sedang dilanda konflik atau perang. Dalam forum tersebut perwakilan negara-negara melakukan diskusi dan rekomendasi tentang langkah-langkah yang perlu diambil dewan dalam melakukan upaya perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM (UNHRC, 2025).

Dewan HAM PBB dibentuk sebagai wadah bagi forum internasional untuk melakukan dialog dan diskusi bersama antara delegasi setiap negara dengan pejabat tinggi PBB, ahli maupun masyarakat sipil terkait isu-isu HAM. Dewan juga mendorong proses pengadopsian resolusi atau keputusan tertentu sebagai isyarat politik yang kuat guna mendorong pemerintahan suatu negara mengambil tindakan yang tepat, cepat dan efektif dalam mengatasi situasi yang dihadapi di negaranya. Dewan HAM PBB berhak untuk meninjau seluruh informasi terkait isu HAM dari semua negara keanggotaan PBB setiap periode 4,5 tahun sekali melalui mekanisme *Universal Periodic Review*. Dewan juga mengawasi setiap situasi di negara-negara rawan konflik, sedang konflik maupun bekas konflik untuk menganalisis isu-isu spesifik serta memberikan wewenang kepada komisi penyelidikan dan penelusuran fakta untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat berdasarkan fakta yang telah diperoleh mengenai pelanggaran HAM dan kejahatan perang (UNHRC, 2025).

Universal Periodic Review sebagai mekanisme khusus yang dilakukan oleh dewan hak asasi manusia telah secara cermat mengamati dan mengevaluasi segala bentuk atau tindakan yang melanggar ketentuan hak asasi manusia. Sebanyak 193 dari total keseluruhan negara keanggotaan PBB telah dilakukan tinjauan secara netral dan menyeluruh terkait hak asasi manusia. Di setiap negara, *Universal Periodic Review* melahirkan perubahan baru melalui ketentuan, undang-undang dan praktik HAM yang mengedepankan perlindungan yang sesuai bagi korban dari perilaku yang mengarah pada tindak pelanggaran HAM. Selain itu, saat ini terdapat 80 ahli independen dengan prosedur dan kewenangan khusus yang diberikan oleh dewan, dapat bertindak sebagai pengawas dalam membantu negara-negara untuk turut mendorong dan memperbaiki pelaksanaan HAM yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (UNHRC, 2022).

Dewan HAM PBB menerapkan *The human rights-based approach* (HRBA) sebagai kerangka kebijakan dalam proses pembentukan karakteristik manusia yang kemudian dijadikan sebagai standar pedoman HAM internasional dalam upaya untuk memajukan serta membangun interaksi berdasarkan

mekanisme berlandaskan HAM (Few, 2022). HRBA merupakan prinsip yang menjadi landasan dalam kebijakan HAM, yang di dalamnya meliputi prinsip-prinsip:

- a. Universalitas, mencakup seluruh aspek HAM tanpa terkecuali.
- b. Indivisibilita, mencakup beberapa hak kehidupan seperti hak politik, hak sipil hingga hak sosial dan budaya.
- c. Kesetaraan dan nondiskriminasi, bahwa setiap negara berhak untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk pelanggaran HAM sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
- d. Partisipasi dan akuntabilitas, bahwa setiap manusia berhak dan mampu untuk menuntut haknya dan pemangku kewajiban perlu bertanggung jawab dalam memenuhi segala aspek tuntutan hak tersebut.

The human rights-based approach memiliki visi dan misi untuk mendorong hasil yang lebih baik serta berkelanjutan dalam pembangunan HAM. Penerapannya dilakukan melalui beberapa strategi, seperti menganalisis dan mengatasi praktik diskriminatif secara *de jure* dan *de facto* hingga adanya hubungan kekuasaan yang bersifat tidak adil. Upaya pembangunan tersebut dilandaskan pada sistem, norma dan kewajiban negara yang sesuai pada hukum internasional yang berlaku. Hal tersebut juga didorong oleh berbagai pemangku kepentingan oleh banyak mitra seperti pemerintah, lembaga swasta dan organisasi non-pemerintah (Suntinger, 2022).

Salah satu tujuan dari *Resolusi 16/18* yang menjadi kerangka kerja yang disepakati secara universal oleh negara keanggotaan PBB adalah “*memerangi intoleransi, stigmatisasi dan stereotip negatif, diskriminatif dan hasutan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap individu ataupun kelompok berdasarkan agama dan kepercayaan*”. Oleh karena itu, dengan adanya *Resolusi 16/18*, maka setiap negara anggota PBB diharuskan untuk senantiasa mencegah serta mengatasi segala bentuk intoleransi beragama serta menerapkan langkah-langkah dalam melindungi dan menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama setiap warga negara dari segala bentuk tindakan intoleransi, diskriminasi dan kekerasan (UNHRC, 2011).

Terdapat beberapa poin penting terkait langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengimplementasikan sikap berdasarkan ketentuan *Resolusi 16/18* Dewan HAM PBB, terutama dalam upaya pencegahan dan melawan segala bentuk tindakan intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan seseorang. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah:

- a. Membangun dan mendorong jaringan kolaboratif dalam menciptakan komitmen untuk saling toleransi antar sesama, kehidupan harmonis dan mendorong dialog interaktif antar elemen masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali lingkungan sosial masyarakat yang aman dan nyaman bagi setiap individu masyarakat terkhususnya kelompok-kelompok minoritas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka.
- b. Menciptakan kebijakan serta mekanisme yang adil dan efektif dalam pemerintahan sebagai langkah untuk mengidentifikasi, mengatasi ataupun mencegah potensi konflik dan ketegangan antar kelompok umat beragama. Mediasi sebagai mekanisme yang perlu dilakukan selanjutnya dalam meredam ketegangan dan konflik yang sedang terjadi.
- c. Memberikan pelatihan bagi pejabat negara serta pembuat kebijakan dalam mendorong upaya kerja sama dalam menciptakan strategi yang efektif dalam melawan dan mencegah intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan seseorang.
- d. Mendorong upaya dialog bersama dengan pemimpin setiap negara untuk mendiskusikan akar permasalahan dari penyebab terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi yang terjadi pada lingkungan sosial masyarakat mereka.
- e. Mendorong upaya untuk menentang dan mengecam segala bentuk tindakan intoleransi dan diskriminasi yang terjadi pada lingkungan sosial masyarakat serta hasutan ataupun provokasi yang mengarah pada kelompok atau komunitas agama.
- f. Mendorong langkah-langkah sistematis untuk mengkriminalisasi ajakan seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengarah pada permasalahan intoleransi dan diskriminasi.
- g. Meningkatkan kualitas pendidikan pada sekolah dan universitas dalam melawan sikap intoleransi dan diskriminasi pada individu ataupun kelompok tertentu serta mengevaluasi sistem pendidikan secara cermat untuk meminimalisir terciptanya gerakan sosial yang mengarah pada tindakan intoleransi dan diskriminasi pada tingkat regional maupun internasional.

- h. Melakukan dialog terbuka antar tokoh keagamaan untuk memberikan ide, gagasan maupun solusi terhadap permasalahan intoleransi dan diskriminasi yang terjadi pada lingkungan sosial masyarakat serta berupaya menjadi perantara yang baik dengan masyarakat untuk melawan dan mencegah tindakan intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan seseorang (UNHRC, 2011).

Kebijakan Equality Act 2010 Sebagai Undang-Undang Anti Diskriminasi Inggris

Pemerintah Inggris sejak awal telah menunjukkan keseriusan dalam membahas implementasi Kebijakan *Resolusi 16/18*. Hal ini bisa dilihat dari usaha pemerintah Inggris untuk melakukan pertemuan internasional tingkat tinggi level menteri pada tahun 2013. Berdasarkan catatan resmi parlemen Inggris, Baroness Warsi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris, menjadi inisiator dalam pertemuan tingkat tinggi level menteri tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Lancaster House yang berada pusat Kota London, Inggris. Pertemuan ini membahas upaya pencegahan diskriminasi, intoleransi dan kebebasan beragama berdasarkan kebijakan *Resolusi 16/18*, dan dihadiri oleh berbagai delegasi negara serta perwakilan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang memiliki fokus utama dalam mengupayakan proses implementasi kebijakan *Resolusi 16/18* pada negara-negara yang hadir pada saat itu, termasuk Inggris.

Namun demikian, penerapan *Resolusi 16/18* tidak bisa dilepaskan dari kerangka hukum yang berlaku pada setiap negara. Selain itu, kerangka hukum yang kuat juga diperlukan sebagai upaya dalam memerangi tindakan diskriminasi dan intoleransi sehingga kelompok minoritas dan kelompok rentan memiliki perlindungan hukum yang sesuai. Di Inggris, persoalan diskriminasi dan rasialisme pada dasarnya telah diatur dalam *Equality Act 2010*. Ini merupakan Undang-Undang yang mengatur masalah diskriminasi dan rasialisme. Undang-Undang ini dibentuk oleh menteri Kerajaan Inggris untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan reformasi serta menyempurnakan kebijakan sebelumnya terkait undang-undang anti-diskriminasi di Inggris yang sebelumnya diatur secara terpisah.

Dalam Undang-Undang yang secara resmi mulai berlaku pada 1 Oktober 2010, terdapat setidaknya sembilan Undang-Undang anti-diskriminasi utama yang digabungkan ke dalam *Equality Act 2010*. Kesembilan UU tersebut adalah: Undang-Undang kesetaraan upah tahun 1970, Undang-Undang Diskriminasi Seksual tahun 1975, Undang-Undang Hubungan Ras tahun 1976, Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas tahun 1995, Peraturan mengenai agama dan kepercayaan tahun 2003, Peraturan mengenai orientasi seksual tahun 2003, Peraturan mengenai usia tahun 2006, Undang-Undang kesetaraan tahun 2006, dan Undang-Undang kesetaraan mengenai orientasi seksual tahun 2007. *Equality Act 2010* memungkinkan setiap individu masyarakat yang menetap di Inggris dilindungi secara hukum yang telah diatur dengan tujuan untuk meningkatkan lingkungan sosial masyarakat yang terbebas dari perilaku diskriminasi dan rasialisme oleh kelompok dan pelaku yang bersangkutan (*United Kingdom Government, 2010*).

Equality Act 2010 merupakan Undang-Undang yang memiliki karakteristik terlindungi (*protected characteristics*) yang luas pada diskriminasi terhadap usia. Ini berbeda dengan kebanyakan karakteristik terlindungi lainnya, diskriminasi berdasarkan usia dapat dibenarkan (*justified*). Artinya, tidak semua perbedaan perlakuan berdasarkan usia secara otomatis dianggap melanggar hukum. Adapun definisi usia yang dilindungi adalah usia tertentu atau kelompok tertentu, misalnya "di bawah 25 tahun" atau "orang berusia 40-an tahun". Bentuk diskriminasi yang dilarang meliputi: diskriminasi langsung, yaitu memperlakukan seseorang lebih buruk karena usianya, dan diskriminasi tidak langsung, yaitu menerapkan aturan atau kebijakan yang tampak netral, tetapi merugikan kelompok usia tertentu secara tidak proporsional.

Adapun untuk kelompok usia di bawah 18 tahun, dalam konteks penyediaan layanan dan fungsi publik, perlindungan dari perilaku diskriminasi diberikan suatu pengecualian atau tidak dapat diberikan kepada mereka dibandingkan dengan mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Pemerintah Inggris percaya bahwa jika tidak ada pengecualian dalam undang-undang anti diskriminasi tersebut, kelompok usia 18 tahun ke bawah akan merasa bahwa segala bentuk protektif terhadap lingkungan mereka akan dianggap sebagai bentuk diskriminasi, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kebijakan perlindungan anak yang berlaku di Inggris (*United Kingdom Government, 2010*).

Karakteristik diskriminasi langsung juga dapat dilihat dari beberapa tindakan atau perlakuan seperti adanya perlakuan yang dilakukan oleh kelompok atau individu terhadap kelompok atau

individu lainnya secara terang-terangan dengan maksud untuk memojokan, mengucilkan dan mengasingkan mereka di lingkungan masyarakat karena adanya perbedaan dari segi etnis, agama, dan kepercayaan mereka. Para pelaku seringkali melakukan tindakan diskriminasi langsung dengan sadar dan sengaja bahwa perilaku yang dia lakukan mengarah pada tindakan yang melanggar hukum dan ketentuan hak asasi manusia kepada korban yang dituju (*United Kingdom Government, 2010*). Agama dan kepercayaan merupakan karakteristik lainnya yang dilindungi dalam undang-undang ini. Definisi mengenai agama dan kepercayaan dalam undang-undang ini mencakup pembahasan yang lebih luas dan komprehensif seperti kebebasan berfikir dan berekspresi, hati nurani dan adat istiadat. Pemerintah Inggris percaya bahwa dengan kehadiran agama dan kepercayaan dalam undang-undang ini dapat menciptakan moral, etika dan kebenaran seseorang dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang saling toleransi dan menghargai antar umat beragama (*United Kingdom Government, 2010*).

Pembentukan *Tell MAMA* Sebagai Upaya Mencegah Gerakan Islamofobia Dan Anti Imigran di Inggris

Tell MAMA (Measuring Anti-Muslim Attack) adalah lembaga independen yang didirikan pada tahun 2012 dengan dukungan pemerintah Inggris. *Tell MAMA* telah berperan penting dalam mendukung penanganan laporan dan pendataan kelompok imigran dengan lebih dari 28.000 orang diantaranya yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan. Melalui kemitraan dengan kepolisian nasional Inggris, selama beberapa tahun *Tell MAMA* melakukan upaya untuk mendukung program pemerintah Inggris terkait perlindungan kelompok imigran. *Tell MAMA* juga melakukan pengelolaan kehidupan baru yang aman bagi kelompok imigran yang ingin menetap di Inggris. Menteri Perumahan, Komunitas, dan Pemerintah Daerah, Lord Khan bahkan memberikan apresiasi kepada *Tell MAMA* yang telah mengembangkan inisiatif penting untuk mencatat, memantau, dan melaporkan insiden kekerasan dan kejahatan terhadap kelompok imigran Muslim Inggris kepada pihak berwajib maupun pada pemerintah Inggris secara langsung sepanjang tahun 2024-2025 (Littler & Feldman, 2015).

Tell MAMA juga melakukan kampanye #NO2H8 dengan *West Midlands Police and Crime Commissioner* dalam menyelenggarakan upacara penghargaan nasional. Ini merupakan upaya lembaga tersebut untuk mendorong kinerja pemerintah Inggris dalam melakukan upaya pencegahan tindakan kekerasan dan kejahatan terhadap kelompok imigran Muslim di Inggris. Komisaris kepolisian West Midlands dalam pidato di kampanye tersebut menegaskan bahwa kejahatan dan kebencian dalam segala bentuknya, termasuk Islamofobia, tidak dapat diterima. Ia menyatakan bahwa memproses kejahatan dan kebencian adalah prioritas Kepolisian West Midlands. Karenanya, ia akan bekerjasama dengan lembaga *Tell MAMA* dalam pengumpulan informasi dari pihak korban dalam upaya penyelidikan dan penangkapan (*West Midlands Police Commissioner, 2016*).

Pemerintah Inggris memiliki data historis yang cukup baik dalam menerima dan mengelola kehidupan baru bagi kelompok imigran yang ingin menetap di Inggris. Pemerintah Inggris sadar bahwa kelompok imigran memerlukan sistem perlindungan yang adil untuk membantu kehidupan mereka di Inggris sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kekurangan yang dialami sebelumnya (*United Kingdom Government, 2021*). Untuk mewujudkan sistem yang adil dan aman bagi kehidupan kelompok imigran di Inggris, pemerintah Inggris membantu kehidupan mereka dengan melakukan berbagai hal, diantaranya:

- a. Mempertahankan komitmen Inggris untuk membantu kelompok imigran yang ingin menetap di Inggris serta memastikan perlindungan bagi kelompok imigran dari tindakan dan perilaku yang mengancam kehidupan mereka di Inggris.
- b. Memberikan izin tinggal tanpa batasan waktu untuk kelompok imigran begitu mereka tiba di Inggris.
- c. Memastikan program pemukiman untuk kelompok imigran berjalan dengan efektif dalam menempatkan mereka pada lingkungan yang layak dan aman bagi kehidupan mereka.
- d. Meningkatkan komitmen dan dukungan yang diberikan untuk kelompok imigran sehingga mereka dapat diterima dalam sistem yang baru di tatanan masyarakat Inggris.
- e. Menerapkan sanksi tegas bagi individu maupun kelompok yang berupaya melakukan tindakan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup kelompok imigran di Inggris.

Selain itu, kelompok imigran di Inggris juga mendapatkan akses publik dan sarana untuk membantu kehidupan baru mereka sehingga mereka dapat terintegrasi dengan masyarakat sipil lainnya di Inggris. Pemerintah Inggris juga ingin keberadaan kelompok imigran dapat memiliki kontribusi yang cukup terkait kebudayaan dan ekonomi Inggris. Dalam memberikan dukungan terhadap kelompok imigran, pemerintah Inggris telah mengalokasikan dana sebesar 14 juta poundsterling untuk transisi pengungsi yang berfokus pada pemerataan tempat tinggal yang layak dan penambahan pelatihan serta lapangan kerja sehingga mereka memiliki keterampilan dan penempatan kerja yang sesuai dalam membangun kehidupan baru mereka di Inggris. Dalam sistem perlindungan, pemerintah Inggris juga membangun sistem yang efektif namun fleksibel dalam membantu kehidupan yang aman bagi kelompok imigran di Inggris (*United Kingdom Government*, 2021).

Menteri Dalam Negeri Inggris, Shabana Mahmood melalui pernyataan tertulis telah mengumumkan kebijakan baru mengenai sistem imigrasi Inggris. “*Negara ini akan selalu menjadi tempat strategis bagi kelompok imigran yang ingin menetap dan memulai kehidupan baru mereka di Inggris. Pemerintah Inggris akan memastikan perlindungan dan pemenuhan kelayakan bagi pendatang sehingga mereka merasa aman tanpa perlu khawatir akan kembali ke negara asal mereka yang tidak layak*” (*United Kingdom Government*, 2026). Kementerian Dalam Negeri Inggris memberikan program ketenagakerjaan bagi pendatang dan kelompok imigran sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya, dengan cara memberikan pelatihan dan dukungan untuk mereka dalam membangun kehidupan layak sebagai masyarakat. Setidaknya terdapat tiga jenis program yang ditawarkan yaitu, dukungan pekerjaan, pelatihan bahasa Inggris, dan dukungan integrasi (*United Kingdom Government*, 2023).

Sejak tahun 2015, pemerintah Inggris memberikan sumber daya yang signifikan dalam meningkatkan pengawasan dan perlindungan untuk kelompok imigran yang menetap di Inggris sehingga mereka terbebas dari rasa takut dan khawatir dari ancaman, kejahatan dan kebencian bagi mereka yang menolak keberadaan imigran di Inggris (*United Kingdom Government*, 2025). Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Inggris diantaranya adalah:

- a. Pembentukan pusat perlindungan suaka yang bekerjasama dengan beberapa lembaga perlindungan nasional seperti *Tell MAMA*.
- b. Pembentukan tim pengamanan nasional serta pelatihan unit mengenai upaya pencegahan dan perlindungan, dan
- c. Pelaksanaan strategi layanan perlindungan imigran.

Selain itu, pemerintah Inggris berupaya membentuk rancana aksi terkait kohesi sosial yang disebut dengan “*Protecting What Matters*”. Ini merupakan langkah inovasi pemerintah Inggris dalam memperkuat struktur sosial masyarakat serta mencegah narasi kebencian yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sayap kanan dengan ideologi ekstrem mereka. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah:

- a. Melanjutkan program dana hibah (*Common Ground Resilience Fund*) yang sebelumnya telah dijalankan pemerintah untuk mendukung upaya kohesi sosial masyarakat Inggris dengan dana bantuan sebesar 5 juta pound sterling dalam periode 2026 hingga 2027.
- b. Membentuk program *cross-government Cohesion Support and Interventions Function* (CSIF) untuk memberikan dukungan langsung terhadap kinerja Pemerintah Inggris dengan bantuan komunitas dan lembaga masyarakat dalam menghadapi permasalahan, ketegangan dan konflik antar masyarakat.
- c. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah serta lembaga masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai kohesi sosial pada masyarakat terutama pada sekolah dan universitas.
- d. Meningkatkan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta lembaga masyarakat dalam mendukung program tersebut (*United Kingdom Government*, 2026).

Walaupun demikian, sistem imigrasi baru yang dijalankan oleh pemerintah Inggris menuai banyak kritikan dari berbagai pihak. Ini terutama karena kebijakan dan peraturannya yang dianggap memberatkan para imigran yang ingin tinggal dan bekerja di Inggris. Sebelumnya Inggris dan Uni Eropa tidak setuju untuk membahas mengenai kebijakan suaka para imigran dalam *EU–UK Trade and Cooperation Agreement* (TCA) karena dalam forum tersebut isu perdagangan dan kerja sama merupakan topik yang lebih difokuskan. Karena kegagalan tersebut, *Dublin III Regulation*, *Eurodac*,

dan instrumen hukum lainnya yang mengatur mengenai sistem suaka para imigran tidak lagi berlaku di Inggris (Mahendra et al., 2025).

Adaptasi Pemerintah Inggris Terhadap *Resolusi 16/18*

Pemerintah Inggris pada dasarnya telah menerapkan *Resolusi 16/18* Dewan HAM PBB melalui *Equality Act 2010*. Implementasi dari resolusi tersebut semakin nyata terlihat dengan adanya dukungan pemerintah Inggris terhadap lembaga *Tell MAMA*. Dalam kerangka implementasi *Resolusi 16/18*, adaptasi yang dilakukan melalui lembaga *Tell MAMA* diantaranya adalah:

- **Mencegah Gerakan Islamophobia dan Anti-imigran**

Ini merupakan adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris terhadap poin 2 *Resolusi 16/18* yang menyatakan: “*Menegaskan kembali bahwa setiap negara keanggotaan PBB untuk melarang segala bentuk intoleransi, diskriminasi dan ujaran kebencian atas dasar agama ataupun kepercayaan seseorang serta menjamin perlindungan hukum yang berlaku secara adil dan efektif.*”

Adaptasi terhadap resolusi ini, dalam implementasinya bisa dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh lembaga *Tell MAMA*. Selama satu dekade lebih, *Tell MAMA* telah membantu menangani laporan korban terhadap kebencian dan kejahatan kelompok minoritas dan komunitas Muslim di Inggris. Keterlibatan *Tell MAMA* dilakukan, diantaranya melalui pengembangan program dan kebijakan pemerintah Inggris dalam upaya menangani tindakan diskriminasi, intoleransi serta kebencian atas dasar agama dan kepercayaan seseorang. *Tell MAMA* juga menegaskan bahwa segala upaya yang telah dilakukan maupun yang akan mereka lakukan ke depannya, semata-mata untuk mencegah kasus kejahatan terhadap kelompok minoritas dan komunitas Muslim di Inggris, sehingga kehidupan mereka dapat berjalan dengan harmonis tanpa adanya rasa takut dan khawatir di ruang publik (*Tell MAMA*, 2023).

Dengan demikian, *Resolusi 16/18* Dewan HAM PBB telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan gerakan Islamophobia dan anti imigran di Inggris. Melalui lembaga *Tell MAMA*, implementasi dari resolusi tersebut telah menimbulkan: (1) Terbentuknya struktur sosial masyarakat yang harmonis, (2) Meningkatnya toleransi antar umat beragama, dan (3) Menguatnya perlindungan Kelompok Minoritas.

Dewan Kepala Kepolisian Nasional Inggris, Gavin Stephens dalam wawancaranya dengan televisi *The New Arab* mengatakan bahwa kepolisian nasional Inggris telah bekerjasama dengan lembaga *Tell MAMA* sejak tahun 2012. Stephens menyebut lembaga tersebut sebagai mitra kunci dalam melawan tindakan diskriminasi, intoleransi, Islamophobia dan anti imigran. Selama bertahun-tahun lembaga tersebut sangat membantu dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan damai bagi seluruh kalangan masyarakat. *Tell MAMA* juga melakukan penyuluhan dengan kepolisian nasional (*National Police Service*) hingga ke beberapa sekolah umum dan universitas di Inggris terkhususnya di wilayah Wales dan London yang memiliki kasus Islamophobia dan anti imigran tertinggi hingga 10.484 pada tahun 2025. Lonjakan kasus tersebut mengalami peningkatan sebesar 25 persen pasca terjadinya konflik antara Israel dan Hamas pada Oktober 2023 (Hamed, 2025).

Kemitraan strategis dengan kepolisian setempat merupakan langkah yang dilakukan *Tell MAMA* dalam menghadapi kasus kebencian anti-Muslim dan anti-imigran di Inggris. Kemitraan tersebut tidak hanya sebatas perjanjian di atas kertas belaka, tetapi aksi nyata di lapangan yang diwujudkan dengan aksi strategis seperti gerakan *Safer Travel for All* dan kampanye *#WeStandTogether* pada tahun 2024 dan 2025 yang dilakukan oleh petugas keamanan lokal yakni *Transport for London* (TfL) dan perwakilan dari *Tell MAMA*. Aksi tersebut dilakukan dengan melakukan kunjungan pada beberapa tempat ibadah dan pusat komunitas Inggris, yang salah satunya adalah *The East London Mosque* (Hamed, 2025).

Program kemitraan strategis dengan kepolisian dan petugas keamanan setempat juga dilakukan dalam bentuk pelatihan dan konsultasi untuk keamanan dan perlindungan komunitas Muslim dan kelompok minoritas. Dalam pelaksanaannya, melalui program ini dibentuk *National Mosques Security Panel* yang bertujuan untuk menyatukan para ahli dari lembaga kepolisian sebagai penasihat dan kepengurusan masjid setempat. Melalui lembaga ini, permasalahan seperti aksi terror dari individu maupun kelompok ekstrimis yang berupaya melakukan tindakan pengrusakan dan kekerasan di lingkungan masjid ditangani. Terdapat beberapa program yang dilakukan melalui *National Mosques*

Security Panel, diantaranya adalah melakukan pengawasan dan membuat rekomendasi sebagai langkah yang perlu diambil oleh lembaga *Tell MAMA*.

Kemudian, pemberian mandat oleh pemerintah Inggris kepada kepengurusan masjid serta tokoh agama dalam mengatasi permasalahan Islamophobia dan anti imigran sesuai dengan mandat yang diberikan. Selain itu, melakukan koordinasi dengan komunitas dan lembaga agama lainnya dalam melakukan pengumpulan informasi dan laporan mengenai Islamophobia dan anti imigran di Inggris. Terakhir, memberikan pelatihan keamanan dasar untuk staf dan kepengurusan masjid setempat sebagai upaya mitigasi awal terkait ancaman dan kejahatan serta apa yang tindakan yang perlu dilakukan apabila hal-hal tersebut terjadi (*Tell MAMA*, 2023).

Lingkungan masyarakat yang aman, damai dan saling menghargai perbedaan merupakan salah satu tujuan yang ingin diwujudkan oleh komunitas Muslim Inggris dan *Tell MAMA*. Dengan memfasilitasi dialog antar elemen masyarakat, *Tell MAMA* berusaha mendorong diskusi yang berlandaskan pada pengetahuan terkait toleransi sebagai upaya untuk saling menjaga antar masyarakat. Pendekatan sosial yang bersifat humanis seringkali lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat dibandingkan upaya pendekatan sosial berbasis persuasif.

- **Peningkatan Toleransi Ummat Beragama**

Pemerintah Inggris melalui lembaga *Tell MAMA* secara prinsip juga telah mengadopsi poin 3 dan 4 dari *Resolusi 16/18* yang berbunyi “*Sangat Prihatin dengan segala bentuk tindakan diskriminasi, intoleransi, dan ujaran kebencian atas dasar agama dan kepercayaan; dan mengecam segala bentuk tindakan diskriminasi, intoleransi, dan ujaran kebencian atas dasar agama dan kepercayaan.*”

Adaptasi terhadap poin 3 dan 4 ini terlihat dari komitmen pemerintah Inggris melalui lembaga *Tell MAMA* yang terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan warga Inggris agar mereka dapat menghargai setiap perbedaan pada lingkungan sosial mereka. Pemantauan ini bahkan dilakukan terhadap sikap toleransi dari sejak usia anak-anak karena ini merupakan langkah awal yang perlu diperhatikan setiap orang tua dalam mendidik anak mereka. Melalui program “*Stand Up! Education Against Discrimination*” yang diselenggarakan sejak tahun 2017, *Tell MAMA* melaksanakan pembelajaran di sekolah-sekolah umum yang mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai dan melawan segala tindakan yang mengarah pada diskriminasi, intoleransi, anti-Muslim dan anti-imigran di Inggris. Program tersebut disambut baik oleh para siswa yang tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa memandang agama, kepercayaan dan etnis mereka. Tujuan *Tell MAMA* memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut adalah untuk membangun karakter setiap individu sejak dini untuk melekat terhadap fenomena Islamophobia dan anti-imigran di Inggris. Dengan program ini, para siswa dapat belajar betapa pentingnya toleransi antar umat beragama di lingkungan masyarakat yang bersifat multikultural (*Tell MAMA*, 2024).

Pasca terjadinya konflik antara militan Hamas dan pasukan Israel pada 7 Oktober 2023 silam, insiden kebencian anti-Muslim dan diskriminasi terhadap kelompok pendatang melonjak secara tajam di Inggris. Lonjakan ini dipicu juga oleh propaganda kelompok ekstrimis Inggris yang menganggap kelompok Islam dan kelompok pendatang sebagai sekelompok orang yang memiliki ideologi seperti teroris yang dapat mengancam kedaulatan nasional Inggris. Pada sisi lain, fenomena antisemitisme terhadap kelompok Yahudi juga melonjak secara signifikan pasca insiden tersebut. Dalam menghadapi permasalahan ini, *Tell MAMA* melakukan upaya pendekatan melalui kerja sama dengan *Community Security Trust* (CST) dan *Board of Deputies* yang bertanggung jawab dalam melindungi komunitas Yahudi di Inggris dari kejahatan anti semitisme.

Melalui komunikasi dan aliansi dengan kedua lembaga perlindungan komunitas Yahudi tersebut, *Tell MAMA* menjalankan kerja sama dalam memperoleh informasi mengenai kejahatan dan kebencian atas dasar agama, ras dan kepercayaan seseorang. Upaya dialog antar agama juga dilakukan oleh Iman Abou Atta, pimpinan lembaga *Tell MAMA* dengan komunitas Yahudi di Inggris. Iman Abou Atta melakukan komunikasi secara insentif dengan mitra dari komunitas Yahudi dalam membina ulang solidaritas antara agama Islam dan Yahudi di Inggris menjadi lebih kuat dalam mengatasi permasalahan Islamophobia, antisemitisme dan diskriminasi terhadap kelompok pendatang (*Tell MAMA*, 2024).

Selain itu, Iman Abou Atta dari *Tell MAMA* menyelenggarakan seminar dengan Jonny Newton selaku perwakilan dari *Community Security Trust* (CST) yang membahas tentang saran dan panduan kepada peserta didik pada tingkatan sekolah dan perguruan tinggi dalam mengatasi dan mencegah perilaku Islamophobia dan anti semitisme pada ruang publik, khususnya pada lingkungan terpelajar seperti sekolah dan perguruan tinggi. Iman Abou Atta juga membuka dialog publik dengan tokoh-tokoh agama serta masyarakat sipil dengan tujuan untuk berdiskusi mengenai identitas, agama dan kepercayaan dalam membangun pemahaman yang lebih luas bagi masyarakat Inggris. Program dialog publik juga dilakukan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi bagi staf pengajar, pelajar dan mahasiswa dengan tujuan untuk mempererat kembali hubungan toleransi antar umat beragama yang sebelumnya dirusak oleh pihak-pihak yang memiliki ideologi ultranasionalis dan ekstrimis terhadap komunitas Muslim dan kelompok imigran di Inggris (*United Kingdom Government*, 2024).

Berbagai bentuk kerja sama memang menjadi ciri khas lembaga *Tell MAMA*. Dalam menjaga hubungan dan ikatan yang kuat dengan komunitas dan lembaga lainnya, lembaga ini selalu melakukan kerja sama dengan membangun ikatan dan kepercayaan dengan komunitas ataupun lembaga agama lainnya di Inggris. Dengan langkah ini, maka kebebasan beragama dan berkepercayaan bagi kelompok minoritas di Inggris dapat diwujudkan tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun.

- **Penguatan Terhadap Perlindungan Kelompok Minoritas**

Adaptasi yang juga dilakukan oleh pemerintah Inggris melalui lembaga *Tell MAMA* terhadap poin 5 *Resolusi 16/18* Dewan HAM PBB, yang berbunyi “*Mengecam segala bentuk kekerasan terhadap seseorang atas dasar agama dan kepercayaan mereka serta tindakan terhadap rumah, sekolah ataupun tempat ibadah mereka.*” Dalam mengimplementasikan poin 5 ini, *Tell MAMA* menghadapi tantangan besar di lapangan. Tantangan tersebut berkaitan dengan meningkatnya kekerasan yang dihadapi komunitas Muslim dan kelompok imigran di Inggris yang kemudian memaksa *Tell MAMA* untuk melakukan upaya penanganan dengan pemerintah Inggris guna membangun lingkungan masyarakat yang aman bagi kelompok minoritas.

Dalam mewujudkan perubahan tersebut, *Tell MAMA* dengan pemerintah Inggris melakukan penanganan dan pemantauan laporan korban secara cepat dan terukur, membentuk kebijakan yang berfokus pada perlindungan kelompok minoritas hingga pembentukan tim keamanan khusus yang melindungi masjid dan sekolah-sekolah Muslim di Inggris. Bahkan sejak tahun 2012, lembaga *Tell MAMA* telah menjadi mitra yang dipercaya dalam melakukan kerja sama dengan Kementerian Perumahan, Komunitas & Pemerintahan Daerah Inggris, serta dengan polisi setempat. *Tell MAMA* menjadi lembaga mitra dalam pelayanan laporan korban bagi kelompok minoritas di Inggris. Pada periode 2024 hingga 2025, *Tell MAMA* bahkan telah menerima bantuan dana sebesar 1 juta pound sterling melalui *Faith Matters* untuk membantu pemerintah Inggris dalam menangani permasalahan diskriminasi, intoleransi, rasisme dan kekerasan pada kelompok minoritas di Inggris (*UK Parliament*, 2025).

Upaya yang dilakukan *Tell MAMA* dalam melindungi kelompok minoritas di Inggris terhadap fenomena Islamophobia dan anti imigran, dilakukan secara sistematis dan mudah untuk dilakukan. Melalui <https://tellmamauk.org>, website resmi *Tell MAMA*, komunitas Muslim dan kelompok imigran di Inggris dapat membaca panduan, tips dan layanan terkait langkah dan bentuk pencegahan yang perlu dilakukan apabila menjadi korban dari upaya kejahatan anti muslim dan anti imigran pada ruang publik di Inggris. *Tell MAMA* juga memberikan pendampingan bagi para korban yang ingin menempuh jalur secara hukum terkait upaya kejahatan dan kebencian anti muslim dan imigran yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Kerja sama strategis dengan kepolisian nasional juga mempermudah *Tell MAMA* dalam membantu laporan para korban untuk memperoleh keadilan dari norma hukum yang berlaku di Inggris (*Tell MAMA*, 2024).

Pada Januari 2016, *Tell MAMA* menandatangani kesepakatan kerja sama dengan beberapa kepolisian di wilayah Inggris seperti Kepolisian Metropolitan, Kepolisian Manchester, Kepolisian Merseyside dan Kepolisian Cheshire. Kemitraan strategis tersebut dilakukan oleh *Tell MAMA* dalam membantu keefektifan kinerja mereka dalam menganalisis dan memetakan perkembangan Islamophobia dan imigran di Inggris dari tahun ke tahun. *Tell MAMA* memiliki komitmen dalam memastikan hak-hak para korban dapat diproses dan ditangani secara hukum yang berlaku (*Tell MAMA*, 2024).

Tell MAMA juga membentuk program *National Mosques Security Panel* dalam mengembangkan langkah-langkah praktis terkait keamanan masjid-masjid di Inggris. Ini merupakan kerja sama strategis antara kepolisian setempat dengan staf dan kepengurusan masjid dalam menghadapi situasi yang tidak kondusif dan mengancam keamanan penghuni masjid dalam beribadah. Mantan komandan kepolisian Scotland Yard, Mak Chishty mengatakan bahwa program tersebut merupakan upaya terobosan yang dilakukan *Tell MAMA* dalam memastikan bahwa setiap individu Muslim dapat dilindungi secara norma hukum yang berlaku di Inggris. Ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan intoleransi dan diskriminasi terhadap komunitas Muslim dan kelompok imigran di Inggris (*Tell MAMA*, 2024).

SIMPULAN

Pemerintah Inggris telah melakukan adaptasi terhadap *Resolusi 16/18* Dewan HAM PBB. Langkah ini diawali dengan melakukan pertemuan internasional tingkat tinggi level menteri pada tahun 2013 untuk membahas upaya pencegahan diskriminasi, intoleransi dan kebebasan beragama berdasarkan kebijakan *Resolusi 16/18* di Lancaster House, London, Inggris. Pertemuan yang dihadiri berbagai delegasi negara serta perwakilan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki fokus utama dalam mengupayakan proses implementasi kebijakan *Resolusi 16/18* pada negara-negara yang hadir pada saat itu, termasuk Inggris.

Sebagai elemen pendukung, adaptasi terhadap *Resolusi 16/18* diterapkan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada setiap negara. Dalam upaya memerangi tindakan diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan memiliki kerangka hukum yang sesuai, pemerintah Inggris mengacu pada *Equality Act 2010*. Ini merupakan kebijakan anti diskriminasi dan intoleransi yang berlaku di Inggris, dan merupakan bentuk komitmen Inggris dalam melindungi setiap warga negaranya tanpa adanya ketentuan yang merugikan pihak manapun.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Inggris memberikan dukungan kepada lembaga *Tell MAMA* sebagai organisasi independen yang diberi mandat untuk menangani laporan terkait tindakan diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas dan komunitas muslim di Inggris. Sebagai organisasi independen, *Tell MAMA* memiliki komitmen untuk membantu pemerintah Inggris dalam upaya penanganan dan pencegahan gerakan Islamophobia dan anti-imigran melalui upaya kolaboratif antara instansi pemerintahan, lembaga swasta, tokoh agama dan masyarakat sipil untuk turut serta dalam membantu penanganan laporan mengenai tindakan kekerasan, kejahatan, dan intoleransi terhadap komunitas muslim dan kelompok imigran sehingga korban mendapatkan perlindungan sesuai hukum yang berlaku dan pelaku mendapatkan sanksi pidana yang setimpal.

Tell MAMA juga menentang semua tindakan tokoh pejabat dan media mainstream yang berupaya melakukan doktrin dan propaganda terhadap komunitas Muslim dan kelompok imigran untuk kepentingan citra politik semata. Namun demikian, kebijakan *Equality Act 2010* belum sepenuhnya menjadi norma anti diskriminasi dan intoleransi yang berlaku secara efektif di Inggris, terutama untuk mencegah gerakan ultra nasionalis dan kelompok sayap kanan terkait ideologi dan doktrin mereka yang merugikan kelompok imigran dan komunitas muslim di Inggris. Karena itu, kehadiran organisasi seperti *Tell MAMA* yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban yang mengalami tindakan kekerasan dan kejahatan yang terjadi pada lingkungan masyarakat, sangat penting terutama untuk membantu mengatasi permasalahan intoleransi dan diskriminasi terhadap komunitas Muslim dan kelompok imigran di Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, T. (2020). Islamophobia as racialised biopolitics in the United Kingdom. *Philosophy and Social Criticism*, 46(5), 497–511. <https://doi.org/10.1177/0191453720903468>
- Aljazeera. (2024). *Far-right protesters target Southport mosque, clash with UK police*. <https://www.aljazeera.com/news/2024/7/31/far-right-protesters-target-southport-mosque-clash-with-uk-police>
- Allchorn, W. (2024). *Chapter 4: Right-Wing Threat Landscape and Far-Right Threat Groups of the Greatest Concern in the United Kingdom*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781802209624.00010>
- Anisa, D. (2020). Hegemoni Wacana Islamophobia. In *Hegemoni Wacana Islamophobia*. Guepedia. <https://play.google.com/books/reader?id=B45LEAAQBAJ&pg=GBS.PA50&hl=en>
- Article 19. (2024). *UN: Time to reaffirm commitment to Resolution 16/18*. <https://www.article19.org/resources/un-time-to-reaffirm-commitment-to-resolution-16-18/>
- Balazard, H., & Peace, T. (2022). *Confronting Islamophobia and its consequences in East London in a context of increased surveillance and stigmatisation*. 23(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/14687968221088016>
- Bello, N. (2025). *The Rise in Racial Tension and Growing Anti-immigration Sentiment in the United Kingdom*. <https://www.humanrightsresearch.org/post/the-rise-in-racial-tension-and-growing-anti-immigration-sentiment-in-the-united-kingdom>
- Chris Allen. (2021). Contemporary Experiences of Islamophobia in Today's United Kingdom: Findings from Ten Small-Scale Studies. *JSTOR*, 23(2).
- Commissioner, W. M. P. and C. (2016). *PCC backs Tell MAMA's #NO2H8 campaign*.
- Council, H. R. (2011). *Resolution adopted by the Human Rights Council 16/18 Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief*. April, 16–18.
- Drury, J., Ball, R., Alejandre, J. C., Hart, N., Saunders, K. R. K., Acar, G., Bauld, L., Cox, D., Cox, S., Hoerst, C., Hope, M., Michie, S., Neville, F., Ntontis, E., Radburn, M., Reicher, S., Stott, C., Vestergren, S., & Wild, R. (2025). *Understanding the 2024 Summer Riots in the UK : Three Case Studies*. May, 1–30.
- Few, R. (2022). *Universal Values Principle One: Human Rights-Based Approach*. https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/human-rights-based-approach?utm_source=chatgpt.com
- Hamed, A. (2025). *What the Tell Mama funding row means for UK anti-Muslim hate crime reporting*. <https://www.newarab.com/features/how-tell-mama-funding-row-could-impact-uk-hate-crime-reporting>
- Hanif Maulana Yusuf, Nazma ruhia sabila, Faraz Gilar Nuladani, I. N. Z. (2019). Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(6), 519.
- Hanif, M. N., Wibisono, I. S., Yusuf, D., Zam, M. V. A., & Hartono, N. J. (2021). Nasionalisme Inggris dan Kekerasan Berbasis Kebencian terhadap Muslim Studi Kasus English Defence League. *Jurnal Sentris*, 2(2), 177–191. <https://doi.org/10.26593/sentris.v2i2.4641.177-191>
- Harding, T. (2025). *Britain set to ditch plans for Islamophobia law*. The National News. <https://www.thenationalnews.com/news/uk/2025/10/16/britain-set-to-ditch-plans-for-islamophobia-law/>
- Hasbullah, A. R., Sovia, S. N., Qamaria, R. S., Rizal, M. C., Widodo, M. F. S., Mustakim, A. A., Wardani, A. K. W., Dermawan, R., Setiawan, Kamil, H., & Rachmatulloh, M. A. (2021). *Beberapa Aspek terkait Hak Asasi Manusia*. Cipta Media Nusantara.
- Humphries, J. (2026). *Man arrested after "axe carried into mosque."* <https://www.bbc.com/news/articles/cwy895lz221o>
- Kari Telle. (2022). UN Resolution 16/18 and the Istanbul Process: What has been achieved? A charting of blasphemy trends in Pakistan and Indonesia. *Chr. Michelsen Institute*, 1.
- Kusumastuti, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lee, B. (2019). *Overview of the Far-Right*. 1–26.
- Limon, M., Ghanea, N., & Power, H. (2014). *COMBATTING GLOBAL RELIGIOUS The*

- implementation of Human Rights* (Issue December).
- Littler, M., & Feldman, M. (2015). *Annual Monitoring , Cumulative Extremism , and Policy Implications*. June.
- Mahendra, F. A., Wismaningsih, & Suherman, A. M. (2025). *British Government Policy in Managing Refugee Problems After the British Exit in 2020 : A Review from International Law*. 4(1), 75–86.
- Tell MAMA. (2023). *'I was terrified': Islamophobic incidents up by 600% in UK since Hamas attack*. <https://tellmamauk.org/i-was-terrified-islamophobic-incidents-up-by-600-in-uk-since-hamas-attack/>